

PERAN KIAI DALAM MENGEMBANGKAN KURIKULUM LOKAL
DI PESANTREN NURUL ISLAM 1 JEMBER

Moh. Qurtubi

Saman Hudi

Dosen Fakultas Tarbiyah Univ. Islam Jember

Email: qurtubi59@gmail.com

Email: simon@uij.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan peran dan strategi Kiai dalam pengembangan kurikulum lokal madrasah berbasis pesantren. Secara lebih rinci, masalah penelitian ini difokuskan pada: (1) peran kiai dalam mendorong tim pengembang kurikulum lokal untuk menganalisis kebutuhan dan pertimbangan yang digunakan pesantren; (2) peran kiai dalam mengarahkan tim pengembang untuk memformulasikan kurikulum lokal di madrasah berbasis pesantren; (3) peran kiai dalam menetapkan kurikulum lokal pada tim pengembang untuk diimplementasikan melalui program ekstrakurikuler; (4) peran kiai dalam membimbing tim untuk melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut.

Penelitian ini dirancang dengan metode kualitatif. Penentuan informan yang dipilih dengan teknik *purposive*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumenter. Prosedur analisis data melalui tahapan *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing*. Sedangkan keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Temuan penelitian ini adalah: **Pertama**, kiai mendorong tim pengembang kurikulum untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan masyarakat terkait dengan kurikulum lokal dengan tetap menjaga sanad keilmuan; **Kedua**, kiai mengarahkan tim pengembang untuk memformulasi kurikulum lokal yang integratif dan adaptif yaitu sesuai dengan situasi, kondisi, dan sarana prasarana pesantren; **Ketiga**, kiai menetapkan pengembangan kurikulum lokal pada tim pengembang untuk diimplementasikan melalui program ekstrakurikuler. **Keempat**, kiai membimbing tim pengembang untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum lokal secara holistik dan komprehensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai serta menentukan rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut

Kata Kunci: Peran Kiai, Pengembangan, Kurikulum Lokal, Madrasah Berbasis Pesantren

Pendahuluan

Dilihat dari *landasan filosofis*, pesantren dapat mempertahankan jati dirinya karena tidak mudah merubah sistem pendidikan di dalamnya. Hal itu karena pesantren tetap memegang teguh filosofi Pancasila Pesantren, yang meliputi: keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah islamiyah dan berjiwa bebas. Ikhlas berarti tidak didorong oleh motif untuk meraih keuntungan tertentu; Kesederhanaan bermakna berjiwa besar, kekuatan, dan ketabahan hati dalam menghadapi berbagai kesulitan; Berdikari (kemandirian) bermakna pesantren tidak menyandarkan hidupnya pada bantuan dan belas kasihan pihak lain; Ukhuwah islamiyah bermakna persaudaraan, persatuan dan, gotong royong; Sedangkan berjiwa bebas bermakna bebas berpikir, berbuat, dan menentukan masa depan serta memilih jalan hidupnya.¹

Majid mengatakan pendidikan pesantren tidak hanya mencerminkan prinsip keislaman, namun juga prinsip keaslian Indonesia (*indigenosity*).² Bahkan Azra juga mengatakan, sebagai lembaga pendidikan *indigenous*, pesantren memiliki akar sosio-historis yang cukup kuat, sehingga membuatnya dapat menduduki posisi sentral sekaligus bertahan di tengah gelombang perubahan. Terdapat spekulasi bahwa “pesantren” telah ada sebelum masa Islam. Jika ini benar, berarti pesantren merupakan lembaga *counterculture* (budaya tandingan) terhadap budaya keilmuan yang dimonopoli kalangan istana dan elite brahmana kala itu.³ Jadi, jika dikaitkan dengan kurikulum yang dikembangkan pesantren akan berlandaskan filosofis Pancasila Pesantren yang telah mengakar kuat, serta prinsip orisinalitas (*indigenosity*), serta prinsip otonomi.

Salah satu komponen penting pada lembaga pendidikan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi dan proses pembelajaran,

¹ Tim Penyusun, *KH. Imam Zarkasyi: Dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, (Ponorogo: Gontor Press, 1996), 427-429, yang dikutip oleh Umar Bukhory, “Status Satuan pendidikan Mu’adalah: Antara Pembebasan dan Pengebirian Jati Diri Pendidikan Pesantren”, *Jurnal KARSA*, Vol. IXI, No. 1 April, (2011), 53

² Nurcholish Majid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 3

³ Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 87.

tolok-ukur keberhasilan dan kualitas hasil pendidikan adalah kurikulum (Sarimuda Nasution, 1995:13). Namun demikian, kurikulum seringkali tidak mampu mengikuti kecepatan laju perkembangan dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebab pengembangan dan pembenahan kurikulum harus senantiasa dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Di sisi lain, kiai memiliki otoritas tertinggi dalam memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan, program, dan kurikulum di dalamnya, serta mewarnai corak dan bentuk kepemimpinan yang ada di pesantren (Tuner Bryan S, 1984:168). Kiai merupakan elemen yang paling esensial. Mayoritas kiai di Jawa dan Madura beranggapan bahwa sebuah pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil di mana kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Meskipun kiai tinggal di pedesaan, mereka merupakan bagian dari kelompok terpendang dalam struktur sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Para kiai yang memimpin pesantren besar telah berhasil memperluas pengaruhnya di wilayah negara, hasilnya mereka banyak yang diterima di tokoh nasional.

Dalam tradisi pesantren telah terbangun sebuah konstruksi sosial yang menempatkan kiai sebagai pribadi yang memiliki integritas moral dan spiritual serta diikuti oleh masyarakat luas. Konstruksi sosial tersebut menempatkan kiai pada posisi yang strategis di dalam lingkungan pesantren, di mana keberadaan kiai tidak tergantikan oleh pimpinan lembaga mana pun, karena pengaruh seorang kiai sangat kuat dan kokoh di lingkungan masyarakat.⁴ Tidak berlebihan bila tugas seorang kiai adalah mampu meningkatkan pengaruh dan selalu melekatkan pada dirinya dengan status kepemimpinan yang mutlak serta mendorong santri senantiasa belajar dengan tekun dan giat.

Dalam meneliti kurikulum pesantren sebenarnya tidak bisa melalui satu isu dan perspektif saja, karena pesantren merupakan multidimensi. Soebahar menyebutkan beberapa penelitian tentang pesantren dari berbagai dimensi, antara lain: *Profil Pesantren* (Prasodjo, et.al, 1974); *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indoneisa* (Dhofier, 1982); *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Steenbreink, 1986); *Pesantren dalam Perubahan Sosial* (Ziemek, 1986); *Kiai dan Perubahan Sosial* (Horikoshi, 1986); *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Mastuhu, 1994); *Pesantren Anak-anak* (Bawani, 1996); *Pesantren Mahasiswa, Pesantren*

⁴ David Jary & Julia Jary. *Collins Dictionary of Sosiology*. (New York: Haper Collins Publisher, 1991), 188

Pertanian (Rahardjo, ed., 1974); *Pesantren Lingkungan* (Ghozali, 2001); dan *Pesantren Buruh Tani* (Nasir, 2002).⁵

Adapun karakteristik kurikulum yang ada pada pesantren modern, mulai diadaptasikan dengan kurikulum pendidikan Islam yang disponsori oleh Kementerian Agama melalui madrasah. Kurikulum khusus pesantren dialokasikan dalam kurikulum lokal atau diterapkan melalui kebijaksanaan sendiri. Gambaran kurikulum lainnya adalah pada pembagian waktu belajar, yaitu mereka belajar keilmuan sesuai dengan kurikulum yang ada di madrasah. Waktu selebihnya dengan jam pelajaran yang padat dari pagi sampai malam untuk mengkaji ilmu Islam khas pesantren.⁶

Dari aspek *landasan yuridis*, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pada Pasal 16 disebutkan, “Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren. Fungsi Pendidikan Pesantren ditujukan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.” Pasal 25 disebutkan pula, “Dalam menjaga mutu pendidikan, Pesantren menyusun kurikulum.” Undang-Undang Pesantren tersebut merupakan penguatan dari Pasal 30 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Terkait dengan pengembangan kurikulum di madrasah, Kementerian Agama telah menetapkan KMA Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab Pada Madrasah. Regulasi terbaru ini merupakan pengganti dari peraturan sejenis sebelumnya, KMA Nomor 165 Tahun 2013. KMA Nomor 183 Tahun 2019 memiliki ruang lingkup, yang terdiri atas: (1) Kerangka Dasar Kurikulum PAI dan Bahasa Arab; (2) Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi PAI dan Bahasa Arab; (3) Pembelajaran PAI dan Bahasa Arab; (4) Penilaian PAI dan Bahasa Arab; dan (5) Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Kesemuanya ini berlaku untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

⁵ Abd. Halim Soebahar, “Pesantren Gender: Rekonstruksi Tiga Pesantren di Jawa”, *Dialog*, No. 58, (2004), 53.

⁶ Ainurrafiq, “Pesantren dan Pembaharuan: Arah dan Implikasi”, dalam Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), 155.

Kemudian, guna melakukan standarisasi implementasi kurikulum pada madrasah, Kementerian Agama menetapkan pedoman implementasi kurikulum pada madrasah melalui KMA Nomor 184 Tahun 2019. KMA ini sebagai pengganti regulasi sebelumnya yakni KMA Nomor 117 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah. KMA Nomor 184 Tahun 2019 merupakan panduan dalam mengimplementasikan kurikulum di madrasah. Ruang lingkup keputusan ini meliputi: (1) Struktur kurikulum; (2) Pengembangan implementasi kurikulum; (3) Muatan lokal; (4) Ekstrakurikuler; (5) Pembelajaran pada madrasah berasrama; dan (6) Penilaian hasil belajar. Struktur kurikulum 2013 dari pemerintah yang harus diimplementasikan di madrasah perlu kebijakan khusus dari Kementerian Agama, mengingat madrasah adalah lembaga pendidikan umum bercirikan Islam. Dalam hal menguatkan program yang menjadi ciri khas dan keunggulan, madrasah dapat melakukan inovasi dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Secara *micro*, pesantren mempunyai kekhasan dan keunikan tersendiri dibandingkan lembaga pendidikan lainnya. Pesantren mempunyai kearifan lokal tersendiri bagi semua elemen yang berkecimpung di dalamnya. Namun, dewasa ini pesantren dihadapkan pada banyak tantangan, termasuk di dalamnya modernisasi sistem pendidikan. Dalam banyak hal, sistem dan kelembagaan pesantren telah dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan pembangunan, terutama dalam aspek kelembagaan yang secara otomatis akan mempengaruhi penetapan kurikulum yang mengacu pada tujuan institusional lembaga tersebut. Selanjutnya, persoalan yang muncul adalah apakah pesantren dalam menentukan kurikulum harus melebur pada tuntutan jaman sekarang, atau justru harus mampu mempertahankannya sebagai ciri khas pesantren yang banyak hal justru lebih mampu mengaktualisasikan eksistensinya di tengah-tengah tuntutan masyarakat.

Pengertian Kiai

Menurut Dhofier, unsur-unsur pesantren diantaranya: pondok, masjid, santri, kitab kuning atau kitab klasik, dan kiai.⁷ Mastuhu juga mengklasifikasikan unsur-unsur pesantren sebagai berikut: (1) pelaku meliputi: kiai, ustad, santri, dan pengurus; (2) sarana perangkat keras meliputi: masjid, rumah kiai, rumah ustad, pondok, gedung sekolah, perpustakaan, aula, kantor pengurus pesantren, kantor organisasi santri, keamanan, koperasi, perbengkelan, jahit-menjahit, dan fasilitas lainnya; dan (3) sarana perangkat

⁷ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 44-53

lunak, meliputi: tujuan, kurikulum, sumber belajar yaitu kitab, buku-buku dan sumber belajar lainnya, cara belajar mengajar (*bandongan, sorogan, halaqoh, dan menghafal*), dan evaluasi belajar mengajar.⁸

Diantara unsur-unsur pesantren tersebut, kiai merupakan tokoh kunci yang menentukan corak kehidupan pesantren. Semua warga pesantren tunduk kepada kiai, mereka berusaha keras melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, serta menjaga agar jangan sampai melakukan hal-hal yang sekiranya tidak direntui kiai, sebaliknya mereka selalu berusaha melakukan hal-hal yang sekiranya direstui kiai.

Istilah kiai ada yang membedakan dengan istilah ulama. Horikoshi membedakan kiai dan ulama terutama dalam perilaku dan pengaruh keduanya di masyarakat. Secara umum ulama lebih merujuk kepada seorang muslim yang berpengetahuan, sedangkan istilah yang paling umum sering digunakan untuk merujuk tingkat keulamaan yang lebih tinggi adalah kiai. Seorang kiai mempunyai pengaruh kharismatik yang luar biasa, sehingga kiai tidak disamakan dengan ulama. Kiai memiliki keunggulan baik secara formal maupun sebagai seorang alim, karena pengaruhnya yang dipercaya oleh sebagian publik. Pengaruh kiai tergantung pada loyalitas komunitas terbatas yang didorong oleh perasaan hutang budi, namun sepenuhnya ditentukan oleh kualitas kekharismaan mereka.⁹

Secara esensial, kata kiai dan ulama memiliki makna yang sama, yakni mereka yang menguasai ilmu agama dan sangat dihormati oleh para santri dan masyarakat. Dalam beberapa hal, kiai terkesan menunjukkan kekhasan dalam bentuk-bentuk pakaian yang digunakan seperti kopyah, surban, sarung, jubah yang menjadi simbol kealiman. Fenomena kharismatik menjadi pengaruh di mana posisi kiai berada. Kiai kharismatik bukanlah kenyataan metafisik tetapi sebuah kualitas manusia yang sepenuhnya bisa diamati secara empirik, karena merupakan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan dan sikap.¹⁰

Mastuhu mengatakan bahwa setiap pesantren memiliki struktur organisasi sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu terhadap yang lain, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Meskipun demikian, dapat disimpulkan adanya kesamaan-kesamaan yang menjadi ciri-ciri umum struktur organisasi pesantren, dan tanpa adanya kecenderungan perubahan yang sama di dalam menatap masa depannya, sebagai berikut:

⁸ Mastuhu, *Dinamika Pesantren*, 58

⁹ Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987), 212

¹⁰ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 213

- a. Pada dasarnya struktur organisasi pesantren dapat digolongkan menjadi dua sayap sesuai dengan pembagian jenis nilai yang mendasarinya, yaitu nilai agama dengan kebenaran absolut dan nilai agama dengan kebenaran relatif. Sayap-1 menjaga nilai kebenaran absolut, dan Sayap-2 menjaga nilai kebenaran relatif, jadi bertanggung jawab pada pengamalan nilai kebenaran absolut, baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren; sedang sayap-1 bertanggung jawab pada kebenaran atau kemurnian ajaran agama.
- b. Sesuai dengan hierarki pembagian jenis nilai sebagaimana tersebut maka Sayap-1 mempunyai supremasi terhadap Sayap-2, dan oleh karena itu Sayap-2 tidak boleh bertentangan dengan Sayap-1, apalagi kalau sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar akidah-syari'ah agama dan sunnah pondok. Sayap-1 merupakan sumber informasi dan konfirmasi bagi Sayap-2 dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Ajaran kiai, ustad, dan kitab-kitab agama yang diajarkan di pesantren diyakini sebagai memiliki kebenaran absolut oleh santri, karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya, hanya perlu dipahami maksudnya.
- c. Sayap-1 dijaga oleh kiai utama dengan dibantu oleh kiai-kiai dan ustad yang telah dinilai kemampuan ilmu agamanya oleh kiai utama. Para pembantu kiai utama ini adalah juga santri-santri dari kiai utama. Sayap-2 dijaga oleh kiai-kiai muda, ustad dan santri. Semua kerja Sayap-2, bahkan semua perilaku warga pesantren harus memperoleh restu kiai utama, atau setidaknya diperbolehkan atau tidak dilarang oleh kiai utama.¹¹

Dalam analisis Wahid, peran kiai yang strategis tersebut adalah sebagai agen budaya (*cultural broker*), bukan berarti sebagai makelar budaya. Peran kiai sebagai agen budaya memiliki peran ganda, satu sisi sebagai pengasuh, pemilik pesantren, pengayom ummat dan peneliti, di sisi lain, kiai sebagai asimilator kebudayaan luar yang masuk ke pesantren.¹² Itulah mengapa, Abdurrahman Wahid menyitir pendapat Hiroko Horikoshi bahwa peran sosial kiai menunjukkan daya dorong dan perubahan yang datang dari pemikiran keagamaan yang diiringi interaksi panjang dengan modernisasi.¹³

Kiai sebagai tokoh utama merupakan elemen yang sangat esensial bagi suatu pesantren. Rata-rata pesantren yang berkembang di Jawa dan Madura sosok kiai begitu sangat berpengaruh kharismatik dan berwibawa, sehingga amat disegani oleh masyarakat dilingkungan pesantren. Menurut asal muasalnya, perkataan kiai dalam bahasa jawa dipakai untuk tiga jenis gelar

¹¹ Mastuhu, *Dinamika Pesantren*, 74

¹² Wahid, *Pesantren sebagai Subkultur*, 46

¹³ Wahid, *Pengantar*, ix

yang saling berbeda. *Pertama*, sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap sakti dan kramat misalnya kiai garuda kencana dipakai untuk sebutan untuk kereta emas yang ada di keraton Yogyakarta. *Kedua*, sebagai gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya. *Ketiga*, sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang ahli agama islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren.¹⁴

Dengan demikian, kiai yang dimaksud penelitian ini adalah pendiri, pengasuh, atau pemimpin pesantren yang memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan/kebijakan, atau pihak berpengaruh yang selalu menjadi sentral. Kiai dalam penelitian ini yaitu kiai utama (Sayap 1), serta dibantu oleh dewan pengasuh lain, para pengurus, dan kepala madrasah sebagai pendukung (Sayap 2) yang juga memiliki kekuasaan atas pesantren tersebut.

Tipologi Kiai

Para kiai memiliki beragam kecondongan dalam menjalankan peranannya di tengah-tengah masyarakat sehingga sebutan kiai pun tidak hanya ditujukan pada mereka yang membimbing santri-santrinya didalam pesantren. Mas'ud memasukkan kiai kedalam lima tipologi:¹⁵

- a) Kiai (ulama) dan multidisipliner yang mengkonsentrasikan diri dalam dunia ilmu; belajar, mengajar, menulis, dan menghasilkan banyak kitab seperti Nawawi Al-Bantani.
- b) Kiai yang ahli dalam salah satu spesialisasi bidang ilmu pengetahuan Islam. Karena keahlian mereka dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan, pesantren mereka terkadang dinamai sesuai dengan spesialisasi mereka, misalnya pesantren al-Qur'an.
- c) Kiai kharismatik yang memperoleh kharismanya dari ilmu pengetahuan keagamaan, khususnya dari sufismenya, seperti KH. Kholil Bangkalan Madura.
- d) Kiai Dai keliling, yang perhatian dan keterlibatannya lebih besar melalui ceramah dalam menyampaikan ilmunya sebagai bentuk interaksi dengan publik bersamaan dengan misi sunnisme atau aswaja dengan bahasa retorikal yang efektif.
- e) Kiai pergerakan, karena peran dan *skill* kepemimpinannya yang luar biasa, baik dalam masyarakat maupun organisasi yang di dirikannya, serta

¹⁴ Amin Haedari & Abdullah Hanif, *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas Dan Tantangan Kompleksitas Global*, (Jakarta: IRD Press, 2004), 28

¹⁵ Mas'ud, *Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 236

kedalaman ilmu keagamaan yang dimilikinya, sehingga menjadi pemimpin yang paling menonjol seperti KH. Hasyim Asy'ari.

Sukamto membaagi kiai dengan beberapa pengertian yaitu: (1) Kiai adalah orang yang memiliki lembaga pondok pesantren, dan menguasai pengetahuan agama serta konsisten dalam menjalankan ajaran-ajaran agama; (2) Kiai yang ditujukan kepada mereka yang mengerti ilmu agama, tanpa memiliki lembaga pondok pesantren atau tidak menetap dan mengajar di pondok pesantren; (3) Kiai adalah orang yang mengajarkan pengetahuan agama dengan cara berceramah, menyampaikan fatwa agama kepada masyarakat luas.¹⁶

Endang Turmudi membedakan kiai menjadi empat kategori yaitu: (1) Kiai Pesantren, adalah kiai yang memusatkan perhatian pada mengajar di pesantren untuk meningkatkan sumberdaya masyarakat melalui peningkatan pendidikan; (2) Kiai tarekat, memusatkan kegiatan mereka dalam membangun batin (dunia hati) umat Islam. Karena tarekat adalah sebuah lembaga informal. Sedangkan para pengikut kiai tarekat adalah anggota formal gerakan tarekat; (3) Kiai panggung, adalah para dai, melalui kegiatan dakwah mereka menyebarkan dan mengembangkan Islam; (4) Kiai politik, merupakan tipologi kiai yang mempunyai *concern* dalam dunia perpolitikan.¹⁷

Dari beberapa tipologi kiai ini, bisa berpengaruh pada pola kepemimpinan yang berbeda, perilaku dan kemampuan membina hubungan dengan publik yang bermacam-macam pula. Namun dalam prinsip *public relations*, bagaimanapun tipe seseorang mereka harus mampu menjalin hubungan baik dengan seluruh *stakeholder*-nya dengan disesuaikan pada konsen kemampuan masing-masing yang dimiliki kiai. Penciptaan karakter yang positif juga akan membantu mencapai hasil yang dikehendaki. Pada hakikatnya seluruh perilaku yang dilakukan oleh seseorang akan berpengaruh terhadap persepsi publik. Dan persepsi inilah yang nanti akan membawa pada kepercayaan dan opini publik yang menyenangkan sehingga tujuan yang dikehendaki bisa tercapai.

Kurikulum Lokal di Pesantren

Kurikulum lokal pesantren sangat erat berkaitan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal lebih sering diartikan sebagai kebijakan lokal (*local wisdom*) yang

¹⁶ Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, 85

¹⁷ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2003), 32

dimiliki, dihormati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau komunitas setempat.

Kearifan lokal dalam disiplin Antropologi dikenal juga dengan istilah *local genius*. *Local genius* ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales.¹⁸ Para Antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini. Sementara Moendardjito mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-ciri kearifan lokal tersebut adalah: (1) Mampu bertahan terhadap budaya luar; (2) Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; (3) Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli; (4) Mempunyai kemampuan mengendalikan; dan (5) Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.¹⁹

Dengan kata lain kearifan lokal merupakan landasan pijak yang memberi jawaban kreatif dari suatu komunitas atas berbagai permasalahan hidup yang bersifat lokal. Nilai dan kebijakan itu lahir dan berkembang dalam proses kehidupan bermasyarakat komunitas tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Tak jarang komunitas setempat lebih mematuhi dan taat kepada peraturan dan norma adat daripada hukum formal. Kearifan lokal tersebut terbentuk dari tradisi lokal dan ajaran agama yang diterapkan oleh komunitas setempat. Tradisi yang berlaku menjadi landasan moral dalam berperilaku, sedangkan ajaran agama menjadi pedoman hidup agar sesuai dengan tuntunan Allah.

Pemanfaatan kearifan lokal yang dilakukan oleh pondok pesantren berdampak positif dalam membangun eksistensi pesantren itu sendiri. Jika dihubungkan dengan dunia public relation, hal tersebut sangat positif dalam membangun citra pesantren dikalangan masyarakat dan dunia di luar pesantren. Kearifan lokal tidak membuat pesantren menjadi statis atau dicap tradisional atau kuno, tapi bisa membuat pesantren tetap relevan dan aktual sesuai zaman.

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang ciri-cirinya dipengaruhi dan ditentukan oleh pribadi para pendiri dan pemimpinya, dan cenderung untuk tidak mengikuti suatu pola jenis tertentu.²⁰ Ciri-ciri pesantren perkotaan bisa

¹⁸ Ayat Rohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), 39

¹⁹ Ibid., 40-41

²⁰ Manfred Ziemik, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1995), 97

dilihat secara geografis, sistem pembelajaran, dan dari perubahan kurikulum yang biasa diterapkan oleh pesantren pada umumnya.²¹

Nilai kearifan lokal di pesantren merupakan wujud dari proses interaksi yang panjang antara agama Islam yang diyakini dan budaya, kemudian terwujud dalam bentuk adat istiadat, kebiasaan, bahasa, sistem kemasyarakatan, budaya guyub, saling menghormati, menghargai, toleransi, jujur, dan sederhana. Pesantren dengan kearifan lokal yang berbentuk sistem nilai dan interaksi sosial yang dimilikinya merupakan ruang yang sarat makna karena terbentuk oleh kekuatan masyarakat pesantren sendiri dan bersumber dari agama.

Istilah kurikulum sebagaimana halnya lembaga pendidikan formal, tidak di dapat pada pondok pesantren, kecuali jika yang dimaksud sebagai *manhaj* (arah pembelajaran tertentu), maka pondok pesantren telah memiliki “kurikulum” melalui *funun* kitab-kitab yang diajarkan pada para santri.²² Menurut Amir Hamzah, seperti dikutip Hasbullah, muatan *manhaj* pesantren lebih terkonsentrasi pada ilmu-ilmu agama, semisal sintaksis Arab, morfologi Arab, hukum Islam, sistem yurisprudensi Islam, hadits, tafsir, Al-Qur’an, teologi Islam, tasawuf, tarikh dan retorika.²³ Senada dengan itu, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa istilah kurikulum tidak dikenal di dunia pesantren, terutama masa pra kemerdekaan, walaupun sebenarnya materi pendidikan sudah ada dan keterampilan itu ada dan diajarkan di pesantren. Kebanyakan pesantren tidak merumuskan dasar dan tujuan pesantren secara eksplisit dalam bentuk kurikulum. Tujuan pendidikan pesantren ditentukan oleh kebijakan Kiai, sesuai dengan perkembangan pesantren tersebut.²⁴

Secara umum, pondok pesantren bisa dibedakan atas pesantren *salafiyah* dan pesantren *khalafiyah*. Dalam konteks keilmuan, pondok pesantren *salafiyah* merupakan jenis pesantren yang tetap mempertahankan pembelajaran kitab-kitab klasik, sebagai inti pendidikannya.²⁵ Disiplin ilmu yang tidak berkaitan dengan agama (pengetahuan umum) tidak diajarkan. Selain itu,

²¹ E. Shobirin Nadj, “Perspektif Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren”, dalam M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 116

²² Departemen Agama, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2001), 43

²³ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 26-27

²⁴ Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 59

²⁵ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 70

sistem pembelajaran yang digunakan masih dengan metode klasik. Metode ini dikenal dengan istilah *sorogan* atau layanan individual (*individual learning process*), dan *wetonan* (berkelompok), yaitu para santri membentuk *halaqah* dan kiai berada di tengah untuk menjelaskan materi agama yang disampaikan. Kegiatan belajar mengajar ini berlangsung tanpa penjenjangan kelas dan kurikulum yang ketat, dan biasanya dengan memisahkan kelompok santri berdasarkan jenis kelamin.²⁶

Kurikulum yang berkembang di pesantren selama ini memperlihatkan sebuah pola yang tetap. Pola itu dapat diringkas ke dalam pokok-pokok berikut: (1) kurikulum ditunjukkan untuk ‘mencetak’ ulama di kemudian hari; (2) struktur dasar kurikulum itu adalah pembelajaran pengetahuan agama dalam segenap tingkatannya dan pemberian pendidikan dalam bentuk bimbingan kepada santri secara pribadi oleh kiai/guru; (3) secara keseluruhan kurikulum yang ada berwatak lentur atau fleksibel, dalam artian setiap santri berkesempatan menyusun kurikulumnya sendiri sepenuhnya atau sebagian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, bahkan pada pesantren yang memiliki sistem pendidikan berbentuk sekolah/ madrasah sekalipun.²⁷

Kurikulum pendidikan pesantren cukup beragam, sesuai dengan tujuan pendidikan dan karakteristik pondok pesantren, proses belajar mengajarnya berlangsung dalam waktu 24 jam. Namun demikian, fungsi yang diembannya sama, yaitu mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, sebagai upaya mewujudkan manusia yang benar dan *kaffah*. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari jenis-jenis materi pendidikan yang diajarkan di pondok pesantren. Hampir seluruh pondok pesantren di seluruh tanah air mengajarkan mata pelajaran yang sama,²⁸ yang dikenal dengan ilmu-ilmu keislaman, yang meliputi: al-Qur’an (tajwid, tafsir dan ilmu tafsir), Al-Hadist, Aqidah/Tauhid, Akhlak/Tasawuf, Fiqh dan Ushul Fiqh, Bahasa Arab (Nahwu, Sorof, Mantiq dan Balaghah) serta Tarikh (Sejarah Islam).²⁹ Materi pendidikan ini diajarkan di pondok pesantren melalui kitab. Kitab standard yang disebut *Al-Kutub Al-mu’tabarah*, ada juga yang menyebutnya sebagai *Al-Kutub Al-Safra’* atau “Kitab Kuning”. Kitab-kitab tersebut tidak menggunakan tanda baca yang lazim.

²⁶ Sulthon Masyhud, et.al, *Manajemen Pondok Pesantren*, ed. Mundzier Suparta, (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), 3

²⁷ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 145

²⁸ Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Islam, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, (Jakarta: Depag RI, 2003), 31

²⁹ Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren)*. (Jakarta: INIS, 1994), 142

Dengan berbahasa Arab atau lebih dikenal dengan istilah “Arab gandul,” sehingga keberhasilan menemukan harakat-harakat yang benar merupakan salah satu indikator keberhasilan pembelajaran di pondok pesantren.

Dengan demikian, bertahannya pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan di masyarakat dikarenakan pondok pesantren dapat memberikan nuansa baru dalam masyarakat tanpa mendobrak nilai-nilai Islam dan di sisi lain bisa relevan dengan zaman tanpa merusak budaya dan kearifan lokal. Integritas dan reputasi yang dibangun oleh kiai sebagai pimpinan di pondok pesantren yang dibantu oleh ustadz (guru) kemudian diturunkan kepada para santri dengan sistem yang dibangun berdasarkan falsafah dan nilai yang mendasari kehidupan di pondok pesantren merupakan kearifan lokal tersendiri yang bisa menjadi bagian dalam strategi dalam pencitraan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan.

Bentuk-bentuk Kurikulum Lokal Madrasah di Pesantren

Salah satu tujuan didirikannya madrasah adalah untuk menciptakan atau mencetak lulusan yang memiliki pemahaman dan keterampilan khusus di bidang keagamaan yang berdaya guna dan berdaya saing di tengah masyarakat. Pada dasarnya, masalah mutu pendidikan erat kaitannya dengan efektivitas pengembangan pendidikan di madrasah. Karakteristik mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari karakteristik madrasah.

Walaupun secara *de jure* madrasah cukup diakui, legitimasi *de facto* masyarakat luas terhadap eksistensi madrasah masih perlu diperjuangkan. Ikatan emosional masyarakat terhadap madrasah semakin melemah seiring dengan menguatnya pertimbangan rasional masyarakat kita dalam menentukan preferensi pendidikan bagi anaknya. Kini anggapan lama yang selalu mengedepankan kuatnya ikatan emosional masyarakat terhadap madrasah dapat dikatakan dihadapkan pada tantangan yang makin sulit dalam merebut simpati masyarakat luas, terlebih pada masyarakat perkotaan.³⁰

Oleh karena itu, lembaga madrasah perlu berbagai pemikiran dan melakukan pembaharuan pendidikan dari dalam. Begitu juga yang dilakukan oleh madrasah yang ada di pondok pesantren Nuris 1 Jember telah memformulasikan beberapa pembaharuan berupa kurikulum lokal, misalnya: (1) Madrasah Sains/M-Sains, (2) Seni, Keagamaan, dan Olahraga, dan (3) Pengembangan Bahasa Arab dan Inggris, (4) MHQ (*Madrasah Huffadzul*

³⁰ Rohmat Mulyana, *Spektrum Pembangunan Madrasah*, 40

Qur'an), dan (5) MPKIS (Manajemen Pengembangan Kitab Kuning); dan (6) Program *Go International* dan *NSEP (Nuris Student Exchange Programme)*.

Secara umum, kompetensi yang harus dicapai peserta didik di madrasah dapat dikelompokkan menjadi tiga dimensi, yaitu: (1) pengembangan kepribadian, (2) pengembangan kecerdasan dan keindahan, (3) pengembangan manusia sebagai individu mandiri. Pengembangan kepribadian antara lain dilakukan dengan memberikan pelajaran agama dan moral. Pendidikan agama dan moral diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku yang dapat meningkatkan produktivitas. Pengembangan kecerdasan dan rasa keindahan dilakukan dengan mengembangkan potensi kecerdasan seni dengan cara memberikan mata pelajaran untuk mengembangkan logika, kemampuan berkomunikasi, dan rasa keindahan. Pengembangan manusia mandiri dilakukan dengan cara memberikan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal untuk mencari nafkah sehingga martabatnya sebagai manusia dapat meningkat. Kompetensi tersebut dapat dicapai jika tenaga kependidikan mampu menjabarkan ke dalam tindakan pembelajaran.

Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran harus mampu mengukur ketiga wilayah kompetensi yang telah dinyatakan di atas, yaitu *knowledge* (kognitif), *skill* (psikomotorik) dan *attitude* (afektif). Untuk melaksanakan evaluasi yang sesuai dengan wilayah kompetensi tersebut diperlukan kemampuan guru dalam memilih dan menggunakan berbagai instrumen evaluasi. Pemilihan instrumen evaluasi disesuaikan dengan wilayah kompetensi yang akan dievaluasi, apakah itu kognitif, afektif atau psikomotorik.³¹ Proses penilaian dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu menggunakan tes dan non-tes. Penggunaan tes dan non-tes adalah dengan melihat jenis kompetensi yang akan diujikan, apakah penilain tersebut untuk menilai kognitif, afektif atau psikomotorik.

Mansyur Ramly mengatakan bahwa, mutu pendidikan dalam konteks sistem pendidikan Indonesia seringkali dirumuskan sebagai akhir dari sebuah pencapaian yang dilakukan melalui serangkaian proses, baik dalam jangka pendek dan menengah maupun jangka panjang. Serangkaian proses pencapaian mutu pendidikan mencakup sebagai berikut: (1) mutu *input*, (2) mutu *proses*, dan (3) mutu *output*. Kesemua unsur tersebut saling berinteraksi dan ketergantungan antara yang satu dan yang lainnya.³²

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa

³¹ Muhaimin, et.al., *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Sekolah & Madrasah*, 30.

³² Mansyur Ramly, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 8

sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. *Input* sumberdaya meliputi sumber daya manusia (kepala madrasah, guru, karyawan, siswa) dan sumberdaya lainnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan sebagainya). *Input* perangkat lunak meliputi struktur organisasi madrasah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dan sebagainya. *Input* harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh madrasah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pepaduan input madrasah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan sebagainya) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya).

Output pendidikan adalah merupakan kinerja madrasah. Kinerja madrasah adalah prestasi madrasah yang dihasilkan dari proses/perilaku madrasah. Kinerja madrasah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output madrasah, dapat dijelaskan bahwa *output* madrasah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi madrasah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, UN, UAS, karya ilmiah, lomba akademik; dan (2) prestasi nonakademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olah raga, kesenian, ketrampilan kejuruan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu madrasah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (*proses*) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Peran Kiai dalam Pengembangan Kurikulum Lokal

Dalam pengembangan kurikulum lokal kiai berperan dan berpartisipasi aktif dalam penentuan kebijakan pengembangan kurikulum lokal, mulai dari formulasi, implementasi, sampai tahap evaluasi

Ada beberapa pendapat mengenai bentuk dan tipe partisipasi. Seperti menurut pandangan Irene, bahwa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, diantaranya: partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta partisipasi representatif.³³

Ada beberapa macam partisipasi, menurut pendapat Cohen dan Uphoff, mereka membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu: *Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.³⁴

Dalam pengembangan kurikulum kiai berperan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dengan membentuk tim pengembang kurikulum. Adapun langkah-langkah yang dilakukan kiai adalah sebagai berikut, **Pertama**, kiai mendorong tim pengembang kurikulum untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan masyarakat terkait dengan kurikulum lokal dengan tetap menjaga sanad keilmuan. Langkah ini diambil oleh kiai karena untuk mengukur keterlibatan alumni pesantren di tengah-tengah masyarakat. Profil alumni menjadi cerminan kebutuhan masyarakat sehingga analisa terhadap kebutuhan masyarakat menjadi penting dalam pengembangan kurikulum. **Kedua**, kiai mengarahkan tim pengembang untuk memformulasi kurikulum lokal yang integratif dan adaptif yaitu sesuai dengan situasi, kondisi, dan sarana prasarana pesantren. Langkah ini diambil oleh kiai karena sebagus apapun muatan kurikulum lokal apabila tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak sesuai dengan lingkungan dan sarana serta prasarana pesantren maka tidak akan bermanfaat bagi keberlangsungan proses belajar mengajar di pesantren. **Ketiga**, kiai menetapkan pengembangan kurikulum lokal pada tim pengembang untuk diimplementasikan melalui program ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di Pesantren Nuris 1 Jember antara lain: (1) Madrasah Sains/M-Sains, (2) Seni, Keagamaan, dan Olahraga, dan (3) Pengembangan Bahasa Arab dan Inggris, (4) MHQ (*Madrasah Huffadzul Qur'an*), dan (5) MPKiS (Manajemen Pengembangan Kitab Kuning); dan (6) Program *Go International* dan NSEP (*Nuris Student Exchange Programme*).

³³ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: kota pelajar 2009), 35

³⁴ Cohen dan Uphoff, *Rural Development Participation: Concepts and Measures For Project Design, Implementation, and Evaluation*, (Ithaca New York: Cornell University, 1977), 78; Dalam Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi*, 40

Langkah ini diambil oleh kiai karena kurikulum nasional di madrasah yang dari kementerian agama sudah banyak sehingga muatan kurikulum lokal untuk mengembangkan potensi santri dan penciri unggulan pesantren bias dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler. **Keempat**, kiai membimbing tim pengembang untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum lokal secara holistik dan komprehensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai serta menentukan rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Langkah ini diambil oleh kiai kurikulum yang telah diputuskan harus dilaksanakan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada hasilnya, karena bisa terjadi hasilnya kurang baik akibat dari pelaksanaan yang tidak maksimal, pelaksanaan tidak maksimal karena perencanaan yang salah. Disamping itu evaluasi secara periodik dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Jadi, temuan substantif penelitian ini yaitu peran dan strategi kiai dalam pengembangan kurikulum lokal pada madrasah berbasis pesantren bersifat *integratif delegatif*.

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan uraian hasil penelitian serta pembahasannya, maka bisa disimpulkan sebagai berikut;

1. Kiai mendorong tim pengembang kurikulum untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan masyarakat terkait dengan kurikulum lokal dengan tetap menjaga sanad keilmuan.
2. Kiai mengarahkan tim pengembang untuk memformulasi kurikulum lokal yang integratif dan adaptif yaitu sesuai dengan situasi, kondisi, dan sarana prasarana pesantren. Langkah ini diambil oleh kiai karena sebagai apapun muatan kurikulum lokal apabila tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak sesuai dengan lingkungan dan sarana serta prasarana pesantren maka tidak akan bermanfaat bagi keberlangsungan proses belajar mengajar di pesantren.
3. Kiai menetapkan pengembangan kurikulum lokal pada tim pengembang untuk diimplementasikan melalui program ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di Pesantren Nuris 1 Jember antara lain: (1) Madrasah Sains/M-Sains, (2) Seni, Keagamaan, dan Olahraga, dan (3) Pengembangan Bahasa Arab dan Inggris, (4) MHQ (*Madrasah Huffadzul Qur'an*), dan (5) MPKiS (Manajemen Pengembangan Kitab Kuning); dan (6) Program *Go International* dan *NSEP (Nuris Student Exchange Programme)*.
4. Kiai membimbing tim pengembang untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum lokal secara holistik dan komprehensif, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai serta menentukan rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Jadi, temuan substantif penelitian ini yaitu peran dan strategi kiai dalam pengembangan kurikulum lokal pada madrasah berbasis pesantren bersifat *integratif delegatif*

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Halim Soebahar, "Pesantren Gender: Rekonstruksi Tiga Pesantren di Jawa", *Dialog*, No. 58, (2004), 53.
- Ainurrafiq, "Pesantren dan Pembaharuan: Arah dan Implikasi", dalam Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), 155
- Amin Haedari & Abdullah Hanif, *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas Dan Tantangan Kompleksitas Global*, (Jakarta: IRD Press, 2004), 28
- Ayat Rohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986)
- Azra, Azyumardi, *Konteks Berteologi di Indonesia, Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Bawani, Imam, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: al-Ikhlash, 1998)
- Bellamy, Richard, *Teori Sosial Modern: Perspektif Italy* (Jakarta: LP3ES, 1990)
- Bottomore, T.B., "Kelompok Elit dalam Masyarakat", dalam Sartono Kartodirdjo (ed) *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1990)
- Boyd et.al. *Manajemen Pemasaran; Suatu Pendekatan Strategis dengan Orientasi Global*. (Jakarta: Erlangga, 2000)
- Bryan, Tuner S, *Sosiologi Islam: Suatu Analisa atas Tesis Sosiologi Weber* (Jakarta: Rajawali, 1984)
- Cohen dan Uphoff, *Rural Development Participation: Concepts and Measures For Project Design, Implementation, and Evaluation*, (Ithaca New York: Cornell University, 1977)

- David Jary & Julia Jary. *Collins Dictionary of Sociology*. (New York: Haper Collins Publisher, 1991)
- Departemen Agama, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2001)
- Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Islam, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, (Jakarta: Depag RI, 2003)
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. (Jakarta: LP3ES, 1994)
- Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2003)
- E. Shobirin Nadj, "Perspektif Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren", dalam M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, (Jakarta: LP3ES, 1985)
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)
- Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987)
- Manfred Ziemik, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1995)
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren)*. (Jakarta: INIS, 1994)
- Mas'ud, *Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LKIS, 2004)
- Mulyana, Rohmat, *Spektrum Pembangunan Madrasah*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2009)
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran: Upaya Reaktualisasi Pendidikan Islam*. (Malang: LKP21, 2009)
- Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997)
- Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: kota pelajar 2009)
- Sukanto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*, (Jakarta: IKAPI, 1999)
- Sulthon Masyhud, et.al, *Manajemen Pondok Pesantren*, ed. Mundzier Suparta, (Jakarta: Diva Pustaka, 2005)

- Wahid, Abdurrahman, “Pengantar” dalam Greg Fealy & Greg Barton (Ed.), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. (Yogyakarta: LkiS, 1997)
- Wahid, Abdurrahman, “Pesantren Sebagai Subkultur” dalam M. Dawam Rahadjo, *Pesantren dan Perubahan*. (Jakarta: LP3ES, 1998)
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2010)
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002)